

PEKERJA ANAK dan PENDIDIKAN di Masyarakat PAPUA

Hubungan antara anak yang bekerja dan pendidikan memiliki makna yang spesifik di dalam masyarakat asli di Provinsi Papua. Keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan dianggap sebagai langkah penting untuk mewariskan keterampilan tradisional dari generasi ke generasi. Oleh karenanya, menurunkan keterampilan tradisional ini merupakan bagian integral dalam pendidikan anak-anak asli Papua. Konsep tradisional “belajar melalui praktek” (*learning by doing*) tidak boleh disalahartikan sebagai kegiatan yang tidak mendidik ataupun melibatkan anak-anak dalam pekerjaan/kegiatan yang berbahaya, dimana masih banyak ditemukan kasus-kasus pekerja anak termasuk dalam bentuk-bentuk yang terburuk, yang juga sedang menjadi perhatian penting di Provinsi Papua.

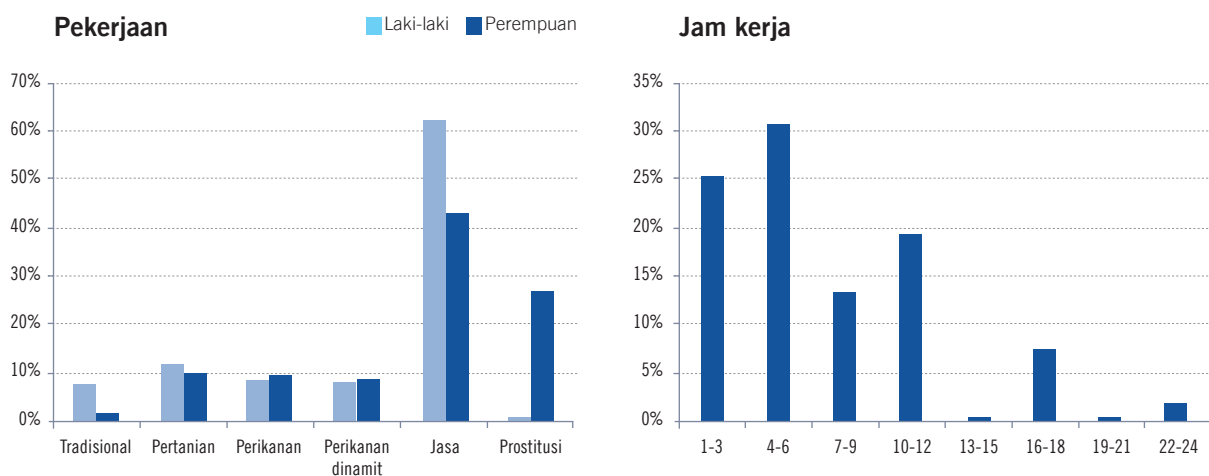
Kegiatan kerja yang dilakukan oleh anak-anak asli Papua dalam pekerjaan-pekerjaan tradisional, di dalam beberapa kasus tertentu dapat diklasifikasikan sebagai proses belajar. Tujuannya adalah untuk membekali generasi baru dengan kompetensi praktis, yang diperlukan bagi mereka untuk memperoleh penghasilan produktif (*subsistence earning*) dan mengintegrasikan mereka ke dalam komunitasnya sebagai orang dewasa nantinya. Namun, kegiatan-kegiatan khusus dan beban kerja yang ada harus diperhatikan secara teliti dan hati-hati. Kegiatan tersebut harus sesuai dengan usia anak, harus diawasi oleh orang dewasa, tidak mengganggu jam sekolah anak, memberikan keseimbangan pada anak untuk dapat bermain dan bersosialisasi, serta tidak boleh berbahaya bagi anak.

Definisi

Berdasarkan Konvensi ILO no. 169¹, **masyarakat asli/indigenous peoples** adalah: a) masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari unsur-unsur lain masyarakat nasional, dan yang statusnya diatur secara keseluruhan maupun sebagian oleh adat atau tradisi mereka sendiri atau oleh undang-undang atau peraturan-peraturan khusus; b) masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai pribumi karena mereka adalah keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan (...) pada waktu penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara saat ini dan yang, tanpa memandang status hukum mereka, tetap mempertahankan beberapa atau seluruh institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri.

UU Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua mendefinisikan **Masyarakat Asli Papua sebagai**: orang-orang keturunan Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau diterima dan diakui oleh masyarakat adat Papua.

¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations belum secara menyeluruh mengadopsi definisi resmi dari *masyarakat asli*.

Bagan 1: Jenis Pekerjaan dan jam kerja anak-anak asli Papua, dalam %

Sumber: ILO-EAST, *Survey Kajian Cepat Pekerja Anak di Masyarakat Asli Papua, 2009*

Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa hal ini tidak selalu terjadi dalam masyarakat asli Papua. Dalam *Country Programme* terbarunya, UNICEF mengindikasikan keprihatinannya terkait perlindungan anak di Provinsi tersebut². Kajian Cepat/*Rapid Assessment Survey* yang dilakukan program ILO-EAST di Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Merauke membahas lebih mendalam terkait isu ini pada tahun 2009³. Kajian Cepat ini menemukan bahwa modalitas pendidikan tradisional di Papua tidak selalu dapat menjelaskan atau menjadi dasar bahwa kenyataannya ditemukan anak laki-laki dan perempuan yang melakukan kegiatan yang berbahaya untuk menghasilkan pendapatan⁴.

Ada beberapa penyebab terjadinya insiden pekerja anak di Papua. Beberapa studi/penelitian dari konteks geografis yang berbeda menemukan bahwa anak-anak kaum asli (*indigenous*) (termasuk anak-anak asli Papua) memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menjadi pekerja anak jika dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya⁵. Hal ini sebagian disebabkan oleh faktor kemiskinan, sebagai salah satu penyebab utama terjadinya pekerja anak, dan sering kali

kemiskinan diasosiasikan dengan masyarakat asli. Penyebab lain yang juga berkontribusi adalah kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat asli mengenai akibat bila anak menjadi pekerja anak terbatasnya pemahaman terkait hak-hak anak.

Salah satu penyebab penting kerentanan terjadinya pekerja anak adalah kurangnya kesempatan untuk mendapatkan akses ke pendidikan. Anak laki-laki dan perempuan di masyarakat asli sering ditemukan berada pada posisi yang dirugikan dalam hal ini. Laporan UNESCO menunjukkan bahwa anak-anak asli umumnya kurang terwakili di dalam pencapaian tujuan program **Pendidikan Untuk Semua**⁶.

Indikator pendidikan menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antara indikator rata-rata di tingkat Nasional serta di Provinsi Papua. Data terakhir (2009⁷) menyatakan bahwa tingkat melek huruf di Provinsi ini adalah 90 persen, atau tiga persen lebih rendah dibandingkan presentase tingkat melek huruf nasional di tahun yang sama (92.9 persen). Di Provinsi Papua, tingkat melek huruf di kabupaten bervariasi, dari 97,48 persen di Kabupaten Biak Numfor, hingga

² UNICEF, *Country programme document 2011-2015*, 2011

³ Ada 664 respondents yang terlibat dalam Survey Kajian Cepat/*Rapid Assessment Survey* dimana 495 diantaranya adalah anak-anak dan kaum muda usia 7 to 21.

⁴ ILO- EAST, *Survei Kajian Cepat Pekerja Anak di Masyarakat Asli Papua*, Jakarta, 2009

⁵ ILO-IPEC & INDISCO-COOP, *Indigenous and tribal children: assessing child labour and education challenges*, Geneva, 2003/Anak-anak suku asli dan adat: Penilaian tantangan Pekerja Anak dan Pendidikan – Jenewa 2003

⁶ UNESCO, *Global Monitoring Report on Education for All*, 2010

30,52 persen di Kabupaten Nduga. Presentase tingkat putus sekolah di level SMP untuk tahun akademis 2008/2009 adalah 4,2 persen⁸. Di beberapa desa, orang tua menyatakan bahwa “di lingkungan kami, hampir semua anak telah putus sekolah⁹.”

Kasus pekerja anak di Provinsi Papua adalah yang tertinggi kedua di Indonesia, menurut Survei Rumah Tangga Sangat Miskin tahun 2008 (RTSM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 130.000 pekerja anak ditemukan berada di Papua (75.000 laki-laki dan 55.000 perempuan) di mana 80.000 diantaranya berusia antara dan kurang dari 15 tahun.

Komitmen Pemerintah Indonesia terkait penyediaan **Pendidikan untuk Semua** tanpa diskriminasi¹⁰, dan terkait penghapusan pekerja anak¹¹, memerlukan kajian tentang apa yang menjadi hambatan perolehan akses ke pendidikan di Papua. Berdasarkan temuan dari kajian cepat yang dilakukan oleh ILO-EAST, Iktisar Kebijakan Singkat (*Policy Brief*) ini disusun sebagai upaya agar dapat menggambarkan permasalahan yang ada serta merekomendasikan beberapa kegiatan prioritas.

Kotak 1: Konteks Provinsi Papua

- **Wilayah dan Kepadatan Penduduk.** Provinsi Papua mencakup 756,881 kilometer persegi¹², dengan kepadatan penduduk 2,7 orang per kilometer persegi. Pada tahun 2010, populasinya adalah 2,8 juta (1,5 juta laki-laki dan 1,3 juta perempuan), membuat Papua sebagai bagian dari provinsi dengan kepadatan penduduk yang rendah di Indonesia¹³.
- **Demografi.** Lebih dari 31% penduduk Papua berada di bawah lima belas tahun, dan hanya 10% berusia lebih dari lima puluh¹⁴. Tanah Papua memiliki etnis yang amat beragam, dengan lebih dari 200 bahasa, 44 suku utama, dan 177 sub-suku¹⁵. Setengah penduduk yang ada di Provinsi Papua berasal dari provinsi/daerah lain di Indonesia¹⁶.
- **Ekonomi.** Berlimpahnya hasil mineral, hutan tropis, dan sumber daya kelautan, Papua memiliki Produk Domestik Regional Bruto tertinggi (PDRB) di Indonesia. Penghasilan yang cukup besar berasal dari pertambangan dan penggalian (62,76% dari pendapatan daerah) dan dari kehutanan (5,3%)¹⁷. Namun, umumnya penduduk Papua bekerja di bidang pertanian, perikanan, dan berburu.
- **Tingkat Kemiskinan, Sumber Daya Manusia dan Perkembangan Infrastruktur.** Meskipun memiliki PDRB yang tinggi, provinsi Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, dimana lebih dari 80 persen rumah tangga hidup di bawah garis kemiskinan¹⁸. Pada tahun 2009, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua adalah 64,3, terendah di negeri ini, dibandingkan IPM nasional 73,4 pada tahun yang sama¹⁹. Jarak rata-rata sebuah rumah tangga ke fasilitas kesehatan terdekat masyarakat adalah 32 km. Kurang lebih 20 persen masyarakat yang dapat menikmati sumber air yang aman dan baik²⁰ dan hanya 9 persen dari kelompok penduduk miskin memiliki kesempatan untuk menikmati akses ke sumber air yang aman dan baik²¹. Setengah dari desa-desa yang ada hanya dapat diakses oleh jalan yang belum beraspal, dan akses ke fasilitas komunikasi seperti telepon terbatas hanya bisa diakses sekitar 10% oleh kaum miskin²².

⁷ Statistik Pendidikan Papua, 2009

⁸ Kementerian Pendidikan Nasional, *Statistik Pendidikan Nasional 2008/2009*, 2009

⁹ *RD for USAID, Papua and Irian Jaya Barat: Basic Education Needs Assessment*, 2007

¹⁰ In 1967 Indonesia meratifikasi Konvensi UNESCO dalam menentang Diskriminasi dalam Pendidikan (1960)

¹¹ Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO mengenai *Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja*, 1973 (No. 138) dengan UU No. 22 tahun 1999 dan menjadi negara Asia pertama yang meratifikasi Konvensi ILO mengenai *Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, 1999 (No. 182) dengan UU No. 1 tahun 2000.

¹² Badan Pusat Statistik, *Papua dalam Angka 2010*, 2010.

¹³ Badan Pusat Statistik, *Papua dalam Angka 2010*, 2010.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Papua dalam Angka 2010*, 2010.

¹⁵ ILO-EAST, *Rapid Assessment Survey of Child Labour Among Indigenous Peoples in Papua*/Survei Kajian Cepat tentang Pekerja Anak di antara Masyarakat Asli di Papua, Jakarta, 2009

¹⁶ Badan Pusat Statistik, *Papua dalam Angka 2010*, 2010.

¹⁷ Badan Pusat Statistik, *Papua dalam Angka 2010*, 2010.

¹⁸ ILO, *Infrastructure, Poverty and Jobs: Introducing Local Resource based Strategies to Eastern Indonesia*/Infrastruktur, Kemiskinan dan Pekerjaan: Memperkenalkan Strategi Berbasis Sumber Daya Lokal ke Indonesia Timur, Jakarta - 2008.

¹⁹ ILO-EAST, *Rapid Assessment Survey of Child Labour Among Indigenous Peoples in Papua*/Survei Kajian Cepat tentang Pekerja Anak di antara Masyarakat Asli di Papua, Jakarta, 2009

²⁰ Bintang Papua, 19 April 2011; lihat http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10299:baru-20-persen-masyarakat-papua-nikmati-sumber-air-yang-baik&catid=1:port-numbay&Itemid=86.

²¹ UNICEF, *Country Programme document 2011-2015*, 2011

²² ILO- EAST, *Survei Kajian Cepat Pekerja Anak di Masyarakat Asli Papua*, Jakarta, 2009

Kotak 2: Hambatan ke pendidikan yang dialami oleh anak-anak asli Papua

1. Akses

- Fisik: fasilitas untuk ke mencapai sekolah;
- Non-fisik: diskriminasi

3. Kualitas

- Persiapan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan siswa asli Papua
- Pengiriman guru yang tidak mencukupi

2. Keterjangkauan

- Biaya langsung: uang sekolah
- Biaya tidak langsung: Perlengkapan sekolah
- Biaya kesempatan (*opportunity cost*) akan waktu anak-anak

4. Relevansi

- Integrasi mata pelajaran lokal yang tidak memadai
- Mono-lingual (satu bahasa)

Berdasarkan kerangka kerja analisis ILO-IPEC seperti diilustrasikan dalam *Combating child labour through education/Memerangi perburuan anak melalui pendidikan* (Jenewa, 2004).

Beberapa hambatan utama terhadap pendidikan di Papua antara lain adalah terbatasnya akses pendidikan baik karena faktor-faktor fisik maupun non fisik.

Karakteristik wilayah Papua sangat membatasi kesempatan anak-anak asli untuk mendapatkan pendidikan. Laporan USAID menyebutkan jarak dari sekolah sebagai alasan utama banyaknya angka putus sekolah di provinsi tersebut²³.

- **Sekolah-sekolah khususnya tingkat SMP ke atas, masih lebih banyak ditemukan di perkotaan.** Akan tetapi sebagian besar siswa tinggal di desa-desa terpencil. Menurut hasil Kajian Cepat ILO-EAST, 70 persen anak-anak yang termasuk dalam studi kasus kajian cepat ini, harus menempuh 'jarak yang jauh' untuk ke sekolah, sementara 8 persen anak-anak dalam studi kasus ini menyatakan 'tidak ada sekolah' yang dapat diakses oleh mereka di manapun.

- **Keterbatasan sistem transportasi dan infrastruktur komunikasi.** Sementara sekolah-sekolah bisa jadi jauh (40 persen anak-anak tinggal antara 4-11 km jauhnya dari fasilitas terdekat²⁴), kondisi jalan-jalan dan ketersediaan transportasi makin memperbesar masalah jarak ini. Peserta didik dari desa-desa sebagian besar berjalan kaki, dengan sampan atau sepeda. Untuk mencapai sekolah bisa memakan waktu dua jam sekali jalan di daerah pesisir. Bisa juga membutuhkan waktu satu minggu dengan berjalan kaki di daerah-daerah yang sangat terpencil²⁵.

Sementara hambatan-hambatan fisik merupakan faktor kritis yang mempengaruhi akses, faktor-faktor non-fisik, seperti berbagai bentuk diskriminasi, juga berkontribusi terhadap tingkat putus sekolah.

- **Orang tua melaporkan perilaku diskriminatif para guru terhadap para siswa asli.** Bentuk-bentuk diskriminasi termasuk stereotipe (*stereotyping*), komentar verbal, dan penilaian subyektif. Kajian

²³ IRD for USAID, *Papua and Irian Jaya Barat: Basic Education Needs Assessment*, 2007

²⁴ ILO-EAST, *Survei Kajian Cepat Pekerja Anak di Masyarakat Asli Papua*, Jakarta, 2009

²⁵ Ibid.

Cepat ILO-EAST menemukan bahwa diskriminasi yang dipersepsikan mempengaruhi 40 persen dari total 495 anak-anak (221 perempuan dan 274 laki-laki) yang disurvei dalam Kajian Cepat²⁶.

- **Kesenjangan kemampuan antara siswa asli dan non-asli (pendatang) mungkin memperburuk perlakuan yang tidak sama.** Anak-anak asli seringkali harus berjuang untuk menyamai hasil teman-teman sekolah mereka. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam sistem pendidikan formal untuk memenuhi kebutuhan siswa asli²⁷.
- **Terlepas dari dampak positif subsidi pemerintah, pendidikan yang terjangkau di Papua tetap menjadi keprihatinan, khususnya karena dampak langsungnya terhadap pekerja anak.** Biaya langsung dan tidak langsung dari pendidikan formal seringkali mengharuskan keluarga-keluarga termiskin untuk menyediakan dana tambahan untuk membiayai sekolah. Jika perlu, anak-anak itu sendiri diminta untuk menyediakan dana tambahan tersebut. Kajian Cepat ILO-EAST menemukan dalam 16 persen studi kasus dari Kajian Cepat²⁸ ini bahwa alasan memasuki pekerja anak adalah kebutuhan anak untuk membayar biaya sekolah. Anak-anak asli Papua yang berasal dari daerah terpencil banyak yang memutuskan untuk pindah ke kota-kota besar, agar dapat memperoleh akses dan kesempatan pendidikan yang lebih baik. Namun ketika mereka berada di kota, mereka kemudian terlibat menjadi pekerja anak agar dapat membiayai sekolah mereka.

Pemerintah pusat dan lokal Indonesia telah mensubsidi pendidikan formal sejak tahun 2005 melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Skema BOS dapat menutupi hingga 70 persen biaya siswa²⁹ untuk pendidikan dasar (SD dan SMP). Keluarga-keluarga dalam *kelompok paling miskin* berhak untuk mendapatkan pembiayaan penuh. Walaupun BOS telah berkontribusi besar untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah³⁰, kemampuan untuk membiayai biaya-biaya sekolah lainnya seperti biaya buku pelajaran, seragam dan transportasi masih merupakan tantangan di Papua.

- Subsidi publik untuk rumah tangga termiskin **tidak selalu dapat menutupi biaya sekolah sepenuhnya**, karena biaya-biaya umumnya ditentukan oleh masing-masing komite sekolah di lapangan. Ketika biaya yang ditutupi hanya 60 atau 70 persen, beberapa keluarga mengalami kesulitan untuk menutupi sisanya³¹.
- Subsidi publik dalam Biaya Operasional Pendidikan (BOP, mirip dengan BOS tapi menargetkan pada biaya-biaya operasional) mensubsidi biaya-biaya ujian, tapi seringkali **mengalami keterlambatan dalam pengirimannya**³². Hal ini menyebabkan para keluarga harus menyediakan biaya tersebut terlebih dahulu.
- **Peraturan masuk untuk sekolah formal mensyaratkan orang tua untuk menyatakan pendapatan tetap mereka setiap bulan.** Akan tetapi, keluarga-keluarga miskin kemungkinan besar tidak memilikinya dan gagasan mengenai pendapatan tetap itu sendiri mungkin tidak berlaku untuk kegiatan-kegiatan tradisional masyarakat asli.
- **Biaya-biaya tidak langsung seperti perlengkapan sekolah atau transportasi bisa tidak terjangkau** dan menghambat kehadiran teratur peserta didik dan pada akhirnya menyebabkan peserta didik putus sekolah.
- Biaya kesempatan (*opportunity cost*) dari waktu anak yang dihabiskan di sekolah daripada untuk menopang pendapatan keluarga kemungkinan besar akan mempengaruhi keterjangkauan pendidikan. Kajian Cepat menemukan bahwa **keluarga miskin memilih mengalokasikan waktu anak-anak mereka pada pekerjaan daripada pada pendidikan**, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari nilai tukar (*the trade-off*) dari pilihan tersebut. Lebih dari sepertiga anak-anak yang bekerja melakukan pekerjaannya karena mereka perlu berkontribusi bagi pendapatan keluarga³³. Pekerjaan mengganggu waktu sekolah dan menyebabkan anak-anak kelelahan dan tidak dapat mengerjakan Pekerjaan Rumah mereka. Alasan-alasan ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya putus sekolah di provinsi tersebut.

²⁶ Ibid.

²⁷ World Indigenous People Conference on Education (WIPCE), Hawaii, 1999

²⁸ ILO- EAST, *Rapid Assessment Survey of Child Labour Among Indigenous Peoples in Papua*/Survei Kajian Cepat tentang Pekerja Anak di antara Masyarakat Asli di Papua, Jakarta, 2009

²⁹ Biaya-biaya mencakup: biaya masuk siswa baru, biaya pendaftaran ulang siswa lama, biaya seragam, uang sekolah, biaya buku, lembar kerja siswa, biaya komputer, biaya koperasi, kursus/pelajaran ekstrakurikuler, biaya pramuka, biaya perpindahan siswa, karya wisata, dan lain-lain (World Bank, *Making BOS effective under decentralization*/Membuat BOS efektif di bawah desentralisasi, 2010)

³⁰ World Bank, *Making BOS effective under decentralization*/Membuat BOS efektif di bawah desentralisasi, 2010

³¹ Ibid

³² IRD untuk USAID, *Papua and Irian Jaya Barat: Basic Education Needs Assessment*/Papua dan Irian Jaya Barat: Penilaian Kebutuhan Pendidikan Dasar, 2007

³³ Ibid., and ILO- EAST, *Rapid Assessment Survey of Child Labour Among Indigenous Peoples in Papua*, Jakarta, 2009

Kualitas pendidikan formal di Papua dibatasi oleh kurangnya pelatihan bagi guru, dan tantangan keterpencilan dan kurangnya infrastruktur.

Bank Dunia telah merangkul tantangan-tantangan terbesar untuk pendidikan di pedesaan sebagai "menghasilkan guru-guru yang berkualitas, mengirim mereka ke sekolah-sekolah di pedesaan, dan memberikan mereka dukungan profesional dan juga dukungan moral"³⁴. Tantangan-tantangan tersebut juga berlaku pada konteks Papua.

- **Persiapan guru, khususnya dalam pembelajaran yang sensitif terhadap budaya asli masyarakat di Papua, masih perlu ditingkatkan.** Bukti dari Kajian Cepat ILO-EAST menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan guru-guru untuk menangani lingkungan pendidikan yang sensitif terhadap budaya asli di masyarakat Papua dengan sikap profesionalisme dan kesetaraan, telah berkontribusi terhadap putus sekolah sekitar 40 persen anak-anak asli Papua yang terlibat dalam studi kasus Kajian Cepat ini³⁵.
- **Ketersediaan guru-guru di pedesaan dibanding di perkotaan tidak seimbang**³⁶, dimana wilayah pedesaan berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Sekolah-sekolah lebih terpusat di kota-kota. Selain itu, guru-guru menunjukkan kesediaan dan motivasi yang rendah untuk bekerja di kabupaten-kabupaten terpencil. Sistem kompensasi untuk tugas di area-area terpencil yang cukup 'berat' sering mengalami keterlambatan, dan tunjangan – jika memang tersedia – jarang didistribusikan tepat waktu. Pengiriman gaji juga tertunda karena kurangnya bank dan keteringgalan jaringan transportasi.
- Tunjangan guru yang kurang memadai dan pengiriman gaji yang terlambat membuat **guru merasa kurang dihargai dan tidak termotivasi**. Akibatnya guru menjadi kurang berkomitmen dan hal ini diwujudkan dalam bentuk profesionalisme yang rendah. Dampak pada kualitas mengajar menjadipengaruh, terutama karena pengawasan

di wilayah yang terisolasi juga terbatas. Orang tua sering kali melaporkan ketidakhadiran guru yang sistematis dan berkepanjangan³⁷.

Kurikulum sekolah tidak relevan dengan konteks lokal dan mengakibatkan ketidaksesuaian dengan tujuan pendidikan.

Meskipun mata pelajaran sekolah distandarkan di seluruh Indonesia, beberapa-mata pelajaran tersebut kurang cocok dengan kebutuhan dan kemampuan para siswa di Papua.

- **Pengetahuan lokal dan mata pencaharian tradisional masih dikesampingkan dari kurikulum sekolah formal yang berlaku di Papua.** Karena itu, banyak keluarga di Papua menganggapnya tidak relevan, karena tidak melengkapi anak-anak mereka dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk berintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat asli ketika dewasa. Kurikulum nasional seringkali mengabaikan nilai-nilai tradisional, kadangkala sebagai akibat sulitnya menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam mata pelajaran sekolah. Akibatnya, muatan pendidikan diambil dari realitas infrastruktur, usaha dan gaya hidup yang tidak ditemukan di daerah pedesaan Papua³⁸.
- **Penggunaan bahasa di pendidikan formal, yaitu Bahasa Indonesia, memiliki keuntungan dan kerugian.** Di satu sisi, anak-anak menjadi fasih mempergunakan bahasa nasional dengan menghadiri sekolah. Hal ini tentu saja perlu untuk memperluas kesempatan kerja dan sosial mereka di masa depan di luar kampung halaman mereka. Di sisi lain, para siswa Papua perlahan-lahan kehilangan kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa tradisional/ bahasa ibu mereka. Bersamaan dengan bahasa, mereka juga kehilangan kemampuan untuk 'menjelajahi lingkungan lokal, berkomunikasi dengan dan menulis kembali tentang kampung halaman mereka untuk kesejahteraan dan masa depan mereka sendiri'³⁹. Di satu sisi mereka berintegrasi dengan lebih baik ke dalam

³⁴ World Bank, *Improving education in rural areas: guidance for rural development specialists*, 2001

³⁵ ILO-EAST, *Survei Kajian Cepat Pekerja Anak di Masyarakat Asli Papua*, Jakarta, 2009

³⁶ ILO-EAST, *Survei Kajian Cepat Pekerja Anak di Masyarakat Asli Papua*, Jakarta, 2009

³⁷ Ibid

³⁸ ILO-IPEC & INDISCO-COOP, *Indigenous and tribal children: assessing child labour and education challenges*/Anak-anak asli dan adat: Penilaian tantangan pekerja anak dan pendidikan, Jenewa, 2003

³⁹ Ibid

masyarakat Indonesia, sayangnya di sisi lain, identitas asli mereka menjadi semakin lemah.

REKOMENDASI

Pemerintah Indonesia (PI) serta Pemerintah Provinsi Papua telah membuat kemajuan-kemajuan dan telah mengembangkan banyak inisiatif yang progresif khususnya untuk meningkatkan akses ke pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak di Papua. Beberapa diantaranya termasuk komitmen untuk (a) membangun Sekolah Satu Atap (SATAP) SD-SMP berasrama⁴⁰, dan (b) meningkatkan jumlah pengiriman guru-guru khususnya ke daerah-daerah/kabupaten-kabupaten terpencil di Papua.

Beberapa rekomendasi di bawah ini, bertujuan untuk melengkapi kebijakan-kebijakan yang telah dijelaskan di atas, serta untuk meningkatkan akses anak-anak asli Papua yang rentan menjadi pekerja anak menuju pendidikan yang berkualitas:

- I. **Meningkatkan kesadaran mengenai pekerja anak, penegakan hukum-hukum yang terkait dan menjamin pendirian Komite Aksi Provinsi untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi Papua.** Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO mengenai *Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja*, 1973 (No. 138) dengan UU No. 22 tahun 1999 dan Konvensi ILO mengenai *Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, 1999 (No. 182) dengan UU No. 1 tahun 2000. Pemerintah juga telah memformulasikan rencana-rencana aksi spesifik untuk mempraktekkan kewajiban-kewajiban internasional. Meskipun demikian, implementasi di Papua berlangsung lambat seperti beberapa penjelasan yang dibahas dalam Ikhtisar Kebijakan Singkat ini. Dengan adanya pekerja anak dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari provinsi ini, sebuah rencana aksi harus dirancang secara khusus untuk Papua. Prioritas harus berfokus pada menegakkan undang-undang anti pekerja anak.
- II. **Melembagakan dan mereplikasi Sistem Pemantauan dan Rujukan Pekerja Anak yang telah dilakukan di Kabupaten Jayapura.** ILO EAST telah bekerja sama dengan Komite Aksi Kabupaten Jayapura Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak untuk melakukan percontohan Sistem Pemantauan dan Rujukan Pekerja Anak sejak tahun 2009. Sebanyak 52 kasus pekerja anak telah berhasil dikembalikan ke pendidikan. Advokasi intensif kepada seluruh pemangku kepentingan dan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan dari pilot ini dan mengembangkannya lebih jauh lagi, di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
- III. **Terus berinvestasi dalam infrastruktur sekolah untuk memperluas akses ke pendidikan serta meningkatkan jumlah pengiriman tenaga pengajar ke daerah terpencil.** Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah perkotaan, pedalaman dan perbatasan melalui beberapa hal sebagai berikut (a) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (b) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan beberapa program pendidikan yang spesifik untuk provinsi Papua seperti (c) Program Pendidikan Murah dan Terjangkau dan (d) Program Pendidikan Bermutu dan Merata⁴¹. Kemudian, beberapa diskusi telah dilakukan antara Pemerintah Nasional dan Pemerintah Provinsi Papua terkait (a) pembangunan Model Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terintegrasi dengan Dunia Usaha (DUDI – Dunia Usaha Dunia Industri), (b) pengembangan dan peningkatan jumlah Sekolah Satu Atap Berasrama (SATAP Berasrama), dan (c) model pembelajaran jarak jauh melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi.⁴²
- IV. **Terus memperkuat usaha menuju pendidikan yang berkualitas.** Subsidi pemerintah seperti BOS telah secara efektif meningkatkan permintaan akan pendidikan. Pelaksanaan program ini di Provinsi Papua membutuhkan strategi khusus, mempertimbangkan ciri fisik daerah ini, serta tingkat pembangunan infrastrukturnya. Di seluruh Indonesia, Angka Partisipasi Murni

⁴⁰ Sekolah satu Atap adalah sekolah yang menyediakan kelas-kelas untuk anak-anak usia sekolah level SMP di gedung Sekolah Dasar (SD), terutama di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki sekolah level SMP;

⁴¹ Indikator Pencapaian Pendidikan di Provinsi Papua tahun 2007 - 2009

⁴² http://www.madina-sk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9207:pemerintah-akan-perioritaskan-pendidikan-di-provinsi-papua&catid=4:kesejahteraan-rakyat&Itemid=54

(APM) anak-anak di kelompok termiskin telah meningkat lebih dari tujuh poin persentase sejak BOS diberlakukan⁴³. Sayangnya, di Papua, subsidi kurang berjalan efektif. Proses pencairannya seringkali terlambat sehingga kurang signifikan dalam mendukung program subsidi ini. Hal ini kemungkinan akan mempengaruhi keputusan suatu keluarga untuk mengirimkan anaknya ke sekolah atau anak menjadi pekerja anak sebagai alternatif untuk membiayai pendidikan.

V. **Mengarusutamakan nilai lokal di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP.**

Hanya mengandalkan pendidikan formal tidak cukup *secara mandiri* memberikan persiapan yang dibutuhkan oleh anak-anak asli Papua. Nilai lokal di dalam sistem pendidikan formal juga penting bagi anak-anak asli Papua untuk dapat tumbuh sebagai orang-orang dewasa yang terampil dan aktif secara ekonomi khususnya di dalam masyarakat mereka dan sebagai bagian masyarakat Indonesia pada umumnya. Di satu sisi, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) perlu digalakkan di Papua, dan kurikulum perlu dibuat agar lebih relevan dengan konteks lokal. Peninjauan kembali kurikulum pendidikan khususnya di Papua perlu didekati sebagai sebuah proses yang inklusif, berpusat pada anak dan terbuka, yang didorong oleh konsultasi dan komunikasi yang berkelanjutan antara komunitas asli dan dengan lembaga-lembaga formal. Di sisi lain, nilai lokal berbasis ‘belajar melalui praktek’ perlu juga diarusutamakan, karena hal itu penting untuk menjamin adanya transfer keterampilan dan pemantauan bahaya-bahaya kerja terkait.

VI. **Memberikan penekanan pada peningkatan kapasitas guru disertai dengan insentif yang memadai.** Strategi-strategi untuk mengurangi hambatan-hambatan ke pendidikan tidak akan berhasil, kecuali jika para guru dipersiapkan untuk melakukan peran mereka. Tanggung jawab mereka membutuhkan lebih dari penguasaan mata pelajaran. Mereka perlu secara khusus dilatih mengenai perbedaan-perbedaan budaya dan pembelajaran lintas budaya, karena cara pengajaran yang dilakukan oleh guru, akan memiliki dampak terhadap memastikan peserta didik untuk tetap berada di sekolah. Pelatihan yang sesuai dan peningkatan mekanisme pengukuran akuntabilitas, juga bisa menjadi insentif yang

efektif dalam meningkatkan profesionalisme para guru. Dalam hal ini, keterpencilan desa-desa di Papua sekali lagi menjadi sebuah tantangan. Karena itu, pemerintah setempat harus mempertimbangkan mekanisme yang paling tepat sasaran untuk membuat guru memiliki tanggung jawab yang sesuai bagi peserta didik mereka dan juga keluarga peserta didik mereka. Guru juga perlu terus dibekali dengan model pembelajaran yang kontekstual.

KESIMPULAN

Di masyarakat asli di pedesaan Papua, pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak seringkali dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari modalitas pendidikan tradisional. Anak laki-laki dan perempuan didorong oleh orang tua mereka untuk terlibat dalam pekerjaan tradisional yang ringan agar dapat menurunkan pengetahuan dan keterampilan lokal lintas generasi. Bagaimanapun juga, di samping ‘belajar melalui praktek (*learning by doing*)’ tradisional yang dilakukan oleh anak-anak asli Papua, Provinsi Papua juga menunjukkan tingkat pekerja anak yang cukup mengkhawatirkan.

Tingginya angka putus sekolah di provinsi ini meningkatkan kerentanan anak-anak terhadap terjadinya permasalahan pekerja anak. Hal ini juga memperburuk keterpinggiran masyarakat asli dari masyarakat Indonesia dalam arti yang lebih luas. Alasan terjadinya putus sekolah bermacam-macam, dan bercabang dari adanya hambatan-hambatan ke pendidikan yang tidak sebanding, yang harus dihadapi oleh anak-anak asli Papua. Hal ini mencakup: *akses*, seperti jarak dari sekolah; *keterjangkauan*, seperti biaya-biaya lain yang diperlukan untuk dapat bersekolah; *kualitas* pengajaran; dan *relevansi* pendidikan formal yang kadang mengabaikan konteks lokal dan mata pencaharian tradisional.

Mengurangi hambatan-hambatan ke pendidikan adalah hal yang paling penting untuk dapat memerangi permasalahan pekerja anak dan mencapai komitmen Indonesia menuju **Pendidikan untuk Semua**. Usaha ini membutuhkan strategi khusus yang didorong oleh masyarakat Asli Papua dan meningkatkan akuntabilitas agar dampak pengurangan pekerja anak bisa dirasakan dan berkontribusi terhadap pendidikan yang inklusif di Papua.

⁴³ World Bank, *Making BOS effective under decentralization*/Membuat BOS efektif di bawah desentralisasi, 2010